



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TAHUN 2019**

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

2020

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap *stakeholders* atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan dan Keuangan 2015-2019.

Laporan Kinerja Biro ini disusun untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mendukung kinerja organisasi Sekretariat Kabinet selama tahun 2019.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam memperbaiki kinerjanya, serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam menyusun program di masa mendatang, sehingga lebih efektif, efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, April 2020

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



Hendri Daud

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan serta hal yang perlu diperbaiki. Pencapaian sasaran strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan sasaran. Pada tahun 2019 Biro Perencanaan dan Keuangan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang keberhasilan capaiannya diukur melalui penetapan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh program dan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Rencana Kerja, serta Penetapan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019 sebesar 98,02% dengan 2 (dua) indikator memperoleh capaian dengan kategori "Memuaskan" dan 3 (tiga) indikator memperoleh capaian dengan kategori "Sangat Baik". Capaian kinerja dikategorikan "Memuaskan" jika capaian $\geq 100\%$. Sedangkan capaian kinerja didefinisikan "Sangat Baik" jika capaian berada pada rentang capaian $85\% < 100\%$. Rincian capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019

Indikator Kinerja Sasaran 1	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80%	77,88%	97,35%
Indikator Kinerja Sasaran 2	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100%	100%	100%
2. Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material	0	0	100%
Indikator Kinerja Sasaran 3	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Tingkat Pemanfaatan Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet	85%	80,30%	94,47%
2. Persentase Kepuasan Unit Kerja Terhadap Pelayanan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80%	78,61%	98,26%

RINGKASAN EKSEKUTIF

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Keterlambatan penyampaian usulan program dan anggaran serta data dukungnya dari unit kerja sehingga menghambat proses penelitian dokumen perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet.
2. Masih terdapat beberapa kekeliruan yang ditemukan pada usulan program dan anggaran dari unit kerja, yaitu antara lain: ketidakselarasan antara dokumen KAK dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan data dukung lainnya, RAB belum sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM), kesalahan perhitungan pada harga satuan maupun total, kurs dollar yang belum disesuaikan dengan data terkini, dan penggunaan akun belum sesuai dengan peruntukannya.
3. Penyampaian data pelaporan pelaksanaan anggaran dari unit kerja yang disampaikan ke Biro Perencanaan dan Keuangan seringkali diterima melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan penghitungan data capaian pelaksanaan anggaran masih dilakukan secara manual oleh unit kerja.
4. Seringkali dokumen usulan revisi yang diterima unit kerja tidak sesuai dengan format usulan revisi yang seharusnya, sehingga proses revisi anggaran membutuhkan waktu yang lebih lama, karena dokumen usulan revisi harus disesuaikan terlebih dahulu dengan format yang seharusnya.
5. PIC yang melaksanakan pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran pada sebagian besar unit kerja berbeda dengan PIC yang menyusun perencanaan anggaran, sehingga seringkali terjadi pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran tidak sinkron dengan perencanaan anggaran. Contohnya pada saat perencanaan anggaran, output dari asdep FO ditetapkan sejumlah 28 dokumen, karena PIC perencanaan dan pelaporan adalah orang yang berbeda, PIC pelaporan anggaran tidak memahami 28 dokumen yang harus dilaporkan terdiri dari apa saja.

Langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan adalah:

- | | |
|---|---|
| 1 | Perlu dibangun Sistem Informasi di Sekretariat Kabinet yang terintegrasi terkait perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran. |
|---|---|

RINGKASAN EKSEKUTIF

2	Perlu adanya pengembangan aplikasi SIKT (Sistem Informasi Kinerja Terpadu) untuk dapat mengakomodir penginputan capaian kinerja sesuai renja secara periodik setiap bulan, dan diintegrasikan dengan SIPT (Sistem Informasi Persuratan Terpadu) untuk menghitung capaian kinerja unit kerja secara tersistem sehingga proses penghitungan capaian kinerja anggaran bias lebih cepat.
3	Berkoordinasi dengan baik secara internal di Biro Perencanaan dan Keuangan maupun secara eksternal dengan seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet agar seluruh tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar, termasuk perlunya ditunjuk satu orang penanggungjawab dari tiap unit kerja untuk menangani pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran sehingga menjadi satu jalur dan memudahkan untuk monitoring.
4	Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya di luar lingkungan Sekretariat Kabinet.
5	Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan lebih intensif kepada koordinator/penanggung jawab/Fasilitasi Operasional anggaran dan pelaksana teknis unit kerja terkait pelaporan pelaksanaan anggaran dan kebijakan revisi anggaran.
6	Meningkatkan kapasitas/pengetahuan pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengikuti sosialisasi/bimtek terkait agar dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada unit kerja terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, sehingga dapat tepat sasaran dan bermanfaat oleh unit kerja.
7	Melakukan penyebarluasan informasi kepada unit kerja melalui Surat Edaran dan Memorandum.

Realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.458.706.574,- atau 85,63% dari pagu setelah revisi terakhir Rp4.038.847.000,-. Persentase realisasi anggaran tersebut selaras dengan capaian kinerja sebesar 98,02%, hal ini menunjukkan capaian penyerapan anggaran yang baik atas tahun 2019.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan	2
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	4
A. Rencana Strategis	4
B. Perjanjian Kinerja	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	7
A. Capaian Kinerja.....	7
B. Analisis Penggunaan Sumber Daya.....	32
BAB IV PENUTUP.....	35
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	5
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	6
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019.....	8
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Sasaran 1	9
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2019	9
Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	11
Tabel 3.5 Hasil Penilaian Responden pada Sasaran 1 Tahun 2019	12
Tabel 3.6 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran pada Sasaran 1 Tahun 2019	14
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Tahun 2019.....	17
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Tahun 2015-2019	18
Tabel 3.9 Penyampaian Laporan Keuangan.....	18
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Tahun 2019.....	21
Tabel 3.11 Kriteria Capaian Kinerja	21
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Tahun 2015-2019.....	22
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2019.....	24
Tabel 3.14 Capaian Output dan Outcome Sasaran 3 Tahun 2019	25
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Tahun 2019	26
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Tahun 2015 s.d. 2019.....	27
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Tahun 2019	29
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Tahun 2015 s.d. 2019.....	30
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2019.....	32
Tabel 3.20 Jumlah Sumber Daya Manusia Lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan.....	33
Tabel 3.21 Jumlah Sumber Daya Manusia Lingkup Bagian Perencanaan.....	33
Tabel 3.22 Jumlah Sumber Daya Manusia Lingkup Bagian Keuangan	34
Tabel 3.23 Jumlah Sumber Daya Manusia Lingkup Bagian Pemantauan dan Evaluasi.....	34

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2015-2019	11
Grafik 3.2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 1 Tahun 2015-2019	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan.....	2
Gambar 2 Visi dan Misi Biro Perencanaan dan Keuangan.....	4
Gambar 3 Kategori Pencapaian Kinerja	7

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai perwujudan upaya penyelenggaraan *good governance*, Pemerintah menerbitkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). penyelenggaraan SAKIP meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan review dan evaluasi kinerja.

Dalam rangka melaksanakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, Sekretariat Kabinet yang mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja, yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja (Eselon II) diwajibkan menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja (Kepala Biro) kepada Pimpinan Unit Organisasi (Deputi). Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Administrasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019 akan dimanfaatkan sebagai bahan penunjang evaluasi akuntabilitas kinerja, acuan penyempurnaan

PENDAHULUAN

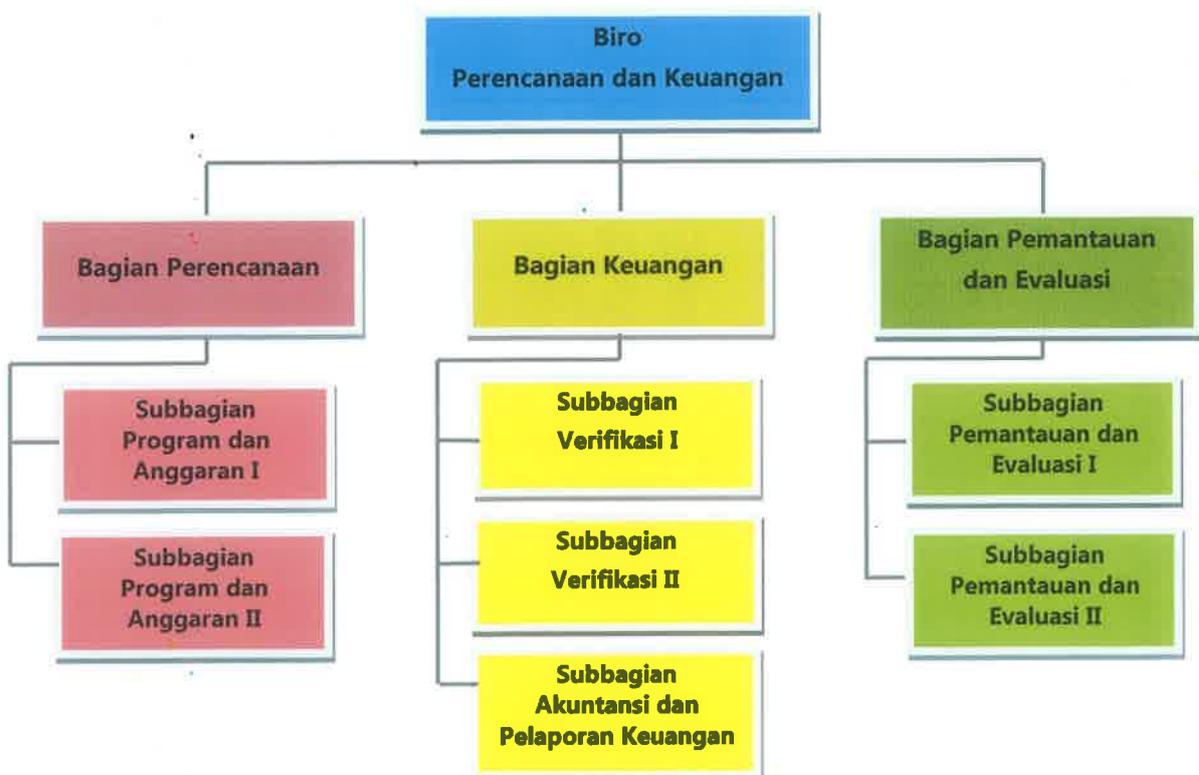
perencanaan kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang sehingga kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan secara keseluruhan dapat menuju ke arah perbaikan.

B. Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang dijabarkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, di tahun 2019 Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri 3 (tiga) bagian, yaitu **Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, serta Bagian Pemantauan dan Evaluasi.**

Struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan



C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan administratif yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet melalui upaya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet serta memberikan pelayanan administrasi keuangan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu Biro Perencanaan dan Keuangan juga sebagai salah satu motor penggerak implementasi SAKIP dimana proses koordinasi penyusunan Rencana Strategis merupakan salah satu tugas pokok dari Biro Perencanaan dan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, dijelaskan bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Administrasi, yang memiliki tugas memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

Sebagai unit kerja yang melakukan pengoordinasian penyusunan program dan anggaran serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Biro Perencanaan dan Keuangan membutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten serta membutuhkan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet sebab Biro Perencanaan dan Keuangan bertanggung jawab terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja dibawah Deputi Bidang Administrasi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Guna mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menetapkan Visi dan Misi yang selanjutnya akan menjadi acuan bagi segenap pejabat/pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi yang sudah diamanatkan oleh organisasi. Sebagai mesin penggerak Biro Perencanaan dan Keuangan, Visi dan Misi tersebut dijabarkan kedalam tujuan strategis yang jelas dan terukur dalam lingkup rencana strategis Biro Perencanaan dan Keuangan.

Gambar 2
Visi dan Misi Biro Perencanaan dan Keuangan

VISI DAN MISI 2015—2019



PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan telah selaras dengan sasaran program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet yaitu Terwujudnya kelancaran, transparansi, dan akuntabilitas tugas Sekretaris Kabinet dan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, dengan indikator kinerja yaitu Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Administrasi serta Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis, Biro Perencanaan dan Keuangan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian IKU Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019
<ul style="list-style-type: none">• Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet.• Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).• Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material.• Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.• Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja juga dilengkapi dengan jumlah alokasi anggaran yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan pencapaian kinerja. Hal ini menandai adanya anggaran berbasis kinerja dalam suatu organisasi, dimana anggaran disusun berdasarkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

PERENCANAAN KINERJA

Sebagai salah satu unit kerja, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun Perjanjian Kinerja sebagai dasar penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Selaras dengan IKU, Biro Perencanaan dan Keuangan menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80%
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan	1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
		2. Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material	0
3.	Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi	1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85%
		2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80%

Guna mewujudkan kinerja yang sudah diperjanjikan, Biro Perencanaan dan Keuangan didukung oleh alokasi anggaran awal sebesar **Rp4.110.047.000,00**. Setelah dilakukan revisi maka alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja menjadi sebesar **Rp4.038.847.000,00**.

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

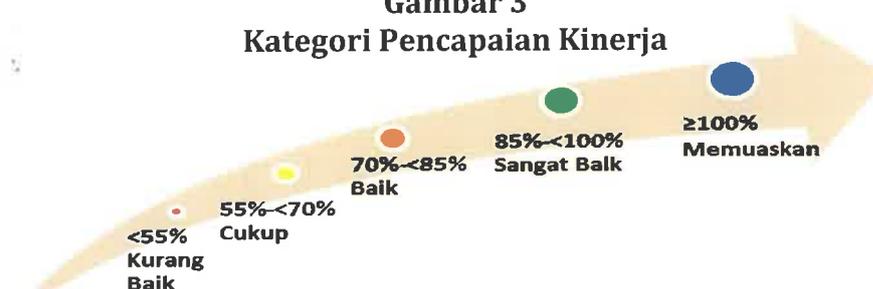
Akuntabilitas merupakan perwujudan atas pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja (LKj) adalah upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) dan akuntabel. LKj Biro Perencanaan dan Keuangan disusun sebagai komitmen dan upaya Biro untuk selalu mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Sekretariat Kabinet sebagai organisasi pemerintah yang akuntabel.

Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran penting dalam susunan organisasi Sekretariat Kabinet, hal ini direpresentasikan melalui dukungan Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap 1(satu) buah program yaitu **“Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet”** dan 1 (satu) kegiatan yaitu **“Dukungan Manajemen Perencanaan dan Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet”**. Pelayanan Biro mencakup seluruh manajemen/ pengelolaan keuangan, dimulai dari proses perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, pelayanan administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan program dan anggaran, sampai dengan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam PK Biro Perencanaan dan Keuangan dengan realisasinya. Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019 dimonitor secara triwulanan dan dilaporkan kepada pimpinan melalui Laporan Capaian Rencana Aksi Penetapan Kinerja Triwulanan. Kategori capaian kinerja yang digunakan pada tahun 2019 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu:

Gambar 3
Kategori Pencapaian Kinerja



AKUNTABILITAS KINERJA

Biro Perencanaan dan Keuangan selama tahun 2015-2019 memiliki Indikator Utama (IKU), dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2019

TAHUN 2016		TAHUN 2017-2018		TAHUN 2019	
IKU	Realisasi	IKU	Target	IKU	Target
% tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77,09%	% tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80%	% tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80%
Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	% kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100%	% kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100%
		Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material	1 Laporan	Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material	0 Laporan
% tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet	73,98%	% tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet	85%	% tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet	85%
		% kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80%	% kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80%

AKUNTABILITAS KINERJA

Tujuan 1

Mewujudkan penyusunan program dan anggaran yang berkualitas di lingkungan Sekretariat Kabinet

Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan untuk setiap indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam PK dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan.

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Sekretariat Kabinet, capaian kinerja pada sasaran diukur melalui 1 (satu) indikator utama, yaitu:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2019

Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80%

Uraian mengenai capaian tersebut dapat dilihat dari Tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Persentase Capaian berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
<i>Output:</i>				
1. Program Kerja	Dok	1	1	100%
2. Renja	Dok	1	1	100%
3. POK	Dok	1	1	100%
4. RKA - KL	Dok	1	1	100%
5. DIPA	Dok	1	1	100%
6. Nota Keuangan	Dok	1	1	100%
7. Bahan Raker/RDP	Dok	1	1	100%
8. Renstra Teknokratik	Dok	1	1	100%

AKUNTABILITAS KINERJA

<i>Outcome :</i> Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	%	80	77,88%	97,35%
--	---	----	--------	--------

1.1 Persentase Kepuasan Unit Kerja Terhadap Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Sekretariat Kabinet

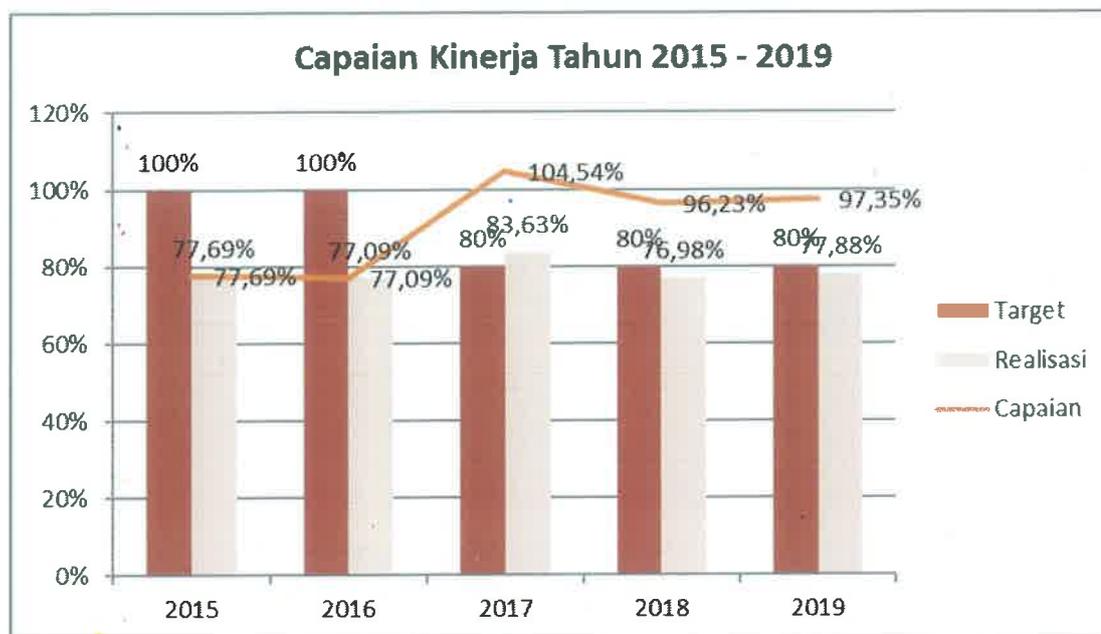
Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja diatas, digunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Indikator kinerja sasaran 1 adalah "Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet". Sejak tahun 2014 indikator kepuasan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet telah digunakan untuk mengukur kualitas layanan perencanaan program dan anggaran. Grafik berikut ini menggambarkan capaian dari indikator dimaksud sejak tahun 2015 hingga tahun 2019.

AKUNTABILITAS KINERJA

Grafik 3.1
Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2015-2019



Grafik di atas mencerminkan bahwa trend realisasi kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1, jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2015-2019, walaupun capaian setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun 2020 dilakukan penyesuaian target menjadi 77%, sesuai dengan rata-rata hasil capaian yang diperoleh selama tahun 2015-2019.

Interpretasi indeks atas hasil pengukuran tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet menggunakan kriteria penilaian berikut ini:

Tabel 3.4
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Nilai Interval	Indeks %	Interpretasi
1 - 1,7499	25% - 43,749%	Sangat Rendah
1,75 - 2,499	43,75% - 62,49%	Rendah
2,50 - 3,249	62,50% - 81,249%	Tinggi
3,25 - 4	81,25% - 100%	Sangat Tinggi

AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk menghitung tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, pada tanggal 13 Januari 2020 dilaksanakan survei secara online dan offline serentak bagi 108 (seratus delapan) responden.

Kuesioner tersebut berjumlah 11 (sebelas) pertanyaan terbagi ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu: Ketanggapan dalam pelayanan (*Responsiveness*); Keandalan dalam pelayanan (*Reliability*); Sarana dan prasarana fisik (*Tangible*); Kepastian dalam pelayanan (*Assurance*); dan Sikap dalam pelayanan (*Empaty*).

Gambaran atas hasil kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Hasil Penilaian Responden pada Sasaran 1 Tahun 2019

No.	Pernyataan	Hasil Survei
Ketanggapan dalam pelayanan (<i>Responsiveness</i>)		
a.	Ketanggapan pelayanan	3,13
b.	Kecepatan pelayanan	3,06
c.	Kemudahan pelayanan	3,11
Keandalan dalam pelayanan (<i>Reliability</i>)		
a.	Kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan	3,09
b.	Ketepatan pelayanan	3,11
Kepastian dalam pelayanan (<i>Assurance</i>)		
a.	Kepastian pelayanan	3,14
b.	Keakuratan pelayanan	3,14
Sikap dalam pelayanan (<i>Empathy</i>)		
a.	Keramahan pegawai dalam memberikan pelayanan	3,21
b.	Kepedulian pegawai dalam pelayanan	3,19
Sarana dan Prasarana dalam pelayanan (<i>Tangible</i>)		
a.	Ketersediaan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan	3,04
b.	Kenyamanan dan kerapihan ruangan pelayanan	3,03
Rata-rata		3,11

Berdasarkan Tabulasi penilaian responden terhadap Layanan penyusunan program dan anggaran diatas, melalui perhitungan indeks mendapat nilai sebesar **3,11 (77,88%)** atau berada di kategori "**Tinggi**" (**2,50 - 3,249**) Adapun target survei pada Rencana Kerja tahun 2019 adalah sebesar 80% sehingga capaian survei adalah sebesar **97,35%**

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2018, dimana diperoleh hasil sebesar 76,98%, maka pada tahun 2019 tingkat kepuasan yang diperoleh mengalami peningkatan sebesar 0,9%. Setelah menghimpun, mengolah dan melakukan analisis terhadap hasil kuesioner diatas dapat dijelaskan bahwa aspek Sikap Dalam Pelayanan (*Empathy*) yaitu keramahan pegawai dalam melayani pertanyaan dari unit kerja mendapatkan index

AKUNTABILITAS KINERJA

tertinggi yaitu sebesar 3,21. Sedangkan Sarana dan Prasarana Fisik (*Tangible*) mendapatkan tingkat kepuasan yang terendah yaitu 3,03 untuk tingkat kepuasan terhadap kenyamanan dan kerapihan ruangan pelayanan.

Terkait dengan hal tersebut, beberapa hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil survei adalah:

1. Kapasitas/pengetahuan pegawai masih perlu ditingkatkan sehingga dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada unit kerja terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran.
2. Koordinasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan serta dengan unit kerja di Sekretariat Kabinet khususnya dengan Fasilitasi Operasional, perlu lebih ditingkatkan sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran di Sekretariat Kabinet dapat berjalan dengan lancar.
3. Penyampaian informasi terkait perencanaan program dan anggaran kepada unit kerja seperti jadwal kegiatan (*time table*), Standar Operasional Prosedur (SOP), peraturan, kebijakan, dll perlu lebih ditingkatkan sehingga terwujud pemahaman yang baik pada unit kerja terkait proses penyusunan dokumen program dan anggaran.

Selain masukan diatas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, yaitu:

1. Keterlambatan penyampaian usulan program dan anggaran serta data dukungnya dari unit kerja sehingga menghambat proses penelitian dokumen perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet.
2. Masih terdapat beberapa kekeliruan yang ditemukan pada usulan program dan anggaran dari unit kerja, yaitu antara lain: ketidakselarasan antara dokumen KAK dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan data dukung lainnya, RAB belum sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM), kesalahan perhitungan pada harga satuan maupun total, kurs dollar yang belum disesuaikan dengan data terkini, dan penggunaan akun belum sesuai dengan peruntukannya.

Berikut ini adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang, sebagai upaya-upaya perbaikan terkait dengan hasil survei yaitu:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis serta meningkatkan koordinasi dengan Kemenkeu dan Bappenas.

AKUNTABILITAS KINERJA

2. Akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada para koordinator dan pelaksana teknis.
3. Melakukan penyebarluasan informasi kepada unit kerja melalui Surat Edaran dan memorandum.

Berikut uraian tentang akuntabilitas keuangan sasaran “**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran**” dilihat dari aspek persentase serapan, penghematan dana maupun efisiensi dan efektifitas penggunaan anggarannya.

Tabel 3.6
Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran pada Sasaran 1
Tahun 2019

No	% Realisasi Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
1.	77,88%	Jumlah dokumen perencanaan program: 1. Program Kerja 2. Renja 3. POK 4. RKA – KL 5. DIPA 6. Nota Keuangan 7. Bahan Raker/RDP POK 8. Renstra Teknokratik	Output	Dok	8	8
			Input	Rupiah	1.882.177.000	1.550.288.647
			Input rata-rata per output	Rupiah	235.272.125	193.786.081
1. Penghematan dana = Rp331.888.353 (0,21%) 2. Efisiensi = Rp41.486.044 per output (0,21%) 3. Efektivitas = % capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)						

Pencapaian sasaran 1 diwujudkan melalui kegiatan Pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan dokumen perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, dan output yang digunakan untuk mengukur efisiensi anggaran dari sasaran ini adalah:

1. Program Kerja;
2. Rencana Kerja;
3. POK;
4. RKA-KL;
5. DIPA;
6. Nota Keuangan;
7. Bahan Raker/RDP; dan
8. Rencana Strategis Teknokratik.

AKUNTABILITAS KINERJA

Proses kegiatan tersebut didukung anggaran sebesar Rp1.822.177.000 (input) dan terealisasi sebesar Rp1.550.288.647 atau 82,37% dari rencana pagu anggaran yang telah tersedia. Walaupun realisasi anggaran hanya sebesar 82,37%, namun seluruh output yang ditargetkan dapat tercapai. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang semula akan dilakukan melalui paket meeting di luar kantor dilaksanakan melalui rapat di dalam kantor.

Adapun perbandingan pagu dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran 1 sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.2
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 1
Tahun 2015-2019



Secara umum, capaian kinerja untuk indikator kinerja “**Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet**” adalah sebesar 97,35% (Memuaskan), dihitung dari realisasi dari tingkat kepuasan unit kerja sebesar 77,88% dibagi dengan target 80%.

AKUNTABILITAS KINERJA

Tujuan 2

Mewujudkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN sesuai peraturan perundang-undangan.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan.

Salah satu fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan adalah penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan. Fungsi tersebut adalah melaksanakan pelayanan dukungan teknis dan administrasi keuangan, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pengoordinasian penyelesaian kerugian negara di lingkungan Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Sasaran strategis kedua Biro Perencanaan dan Keuangan adalah **"Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan"**. Guna menilai pencapaian sasaran strategis tersebut, ditetapkan beberapa indikator kinerja sebagai acuan pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Indikator kinerja tersebut adalah:

1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material.

Adapun capaian indikator kinerja selama tahun 2019 dijabarkan sebagai berikut:

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100%	100%	100%

Pada tahun 2019, kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ditargetkan sebesar 100%, dan secara keseluruhan target tersebut terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet tahun 2018 Nomor: 83A/HP/XVI/05/2019, tanggal 15 Mei 2019, BPK memberikan opini bahwa

Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Setkab tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selanjutnya, perbandingan target dan capaian kinerja sasaran terkait kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai

AKUNTABILITAS KINERJA

target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis (Tahun 2015-2019) dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah					
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, persentase capaian kinerja terkait kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kinerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena sistem dan koordinasi penyusunan laporan keuangan yang ada baik internal dan eksternal sudah baik.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan bertanggungjawab untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan. Selain kesesuaian dengan SAP, ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan kepada Kementerian Keuangan juga menjadi tolak ukur dalam mendukung pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Adapun selama tahun 2019, ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Penyampaian Laporan Keuangan

No	Laporan Keuangan	Dasar Penetapan Waktu Penyampaian	Target Waktu	Realisasi Penyampaian	Status
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet (Unaudited) Tahun 2018	Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-9861/PB/2018, tanggal 28 Desember 2018	21 Februari 2019	19 Februari 2019	Tepat waktu

AKUNTABILITAS KINERJA

No	Laporan Keuangan	Dasar Penetapan Waktu Penyampaian	Target Waktu	Realisasi Penyampaian	Status
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet (<i>Audited</i>) Tahun 2018	Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: Und-142/PB/2019, tanggal 21 Maret 2019	20 April 2019	16 April 2019	Tepat waktu
3	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2019	Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-625/PB/2019, tanggal 26 Juni 2019	31 Juli 2019	29 Juli 2019	Tepat waktu

Laporan Keuangan TA 2018 telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Standar tersebut menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Sekretariat Kabinet, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan dan belanja dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sekretariat Kabinet sebagai salah satu Satuan Kerja pada pemerintah pusat merupakan entitas akuntansi yang menjadi bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat memiliki peranan penting dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap dan benar demi tercapainya kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan, dilakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara Sekretariat Kabinet selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I selaku Bendahara Umum Negara (BUN) secara periodik yaitu setiap sebulan sekali. Dalam rekonsiliasi tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca yang disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), sedangkan Kuasa BUN menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi

AKUNTABILITAS KINERJA

Anggaran dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Selain itu telah dilaksanakan pula rekonsiliasi internal untuk membandingkan realisasi anggaran berdasarkan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) dengan Sistem Informasi Keuangan (SISKA).

AKUNTABILITAS KINERJA

2.2. Jumlah Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan yang Material

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan	Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material	0	0	100%

Indikator kinerja kedua yaitu “Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material” sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Adapun untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja ini menggunakan pengukuran skala interval yang dihasilkan dari proses pengukuran, dimana dalam pengukuran tersebut diasumsikan terdapat satuan (unit) pengukuran yang sama. Adapun fomulasinya dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Kriteria Capaian Kinerja

Jumlah Temuan Material	Persentase Capaian Kinerja
0	100%
1-3	90%
4-6	80%
7-9	70%
10-12	60%
>12	50%

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel diatas, pengukuran capaian kinerja dengan skala interval ini menggunakan asumsi semakin rendahnya atau bahkan 0 (nol) jumlah temuan material, maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Selanjutnya, perbandingan target dan capaian kinerja sasaran terkait jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material sesuai target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis (Tahun 2015-2019) dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material					
Target	0	0	0	0	0
Realisasi	0	0	0	0	0
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, persentase capaian kinerja terkait jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta telah menerapkan sistem pengendalian internal yang baik.

Pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2018 oleh BPK menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2018 yang terdiri dari 3 (tiga) laporan yaitu:

- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Nomor: 83A/HP/XVI/05/2019, tanggal 15 Mei 2019;
- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor: 83B/HP/XVI/05/2019, tanggal 15 Mei 2019;
- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Nomor: 83C/HP/XVI/05/2019, tanggal 15 Mei 2019.

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan nomor: 74/S/V-XVI.1/05/2019, tanggal 20 Mei 2019, perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Sekretariat Kabinet Tahun 2018, BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan yaitu **“Wajar Tanpa Pengecualian”**. Adanya opini dimaksud menandakan bahwa tidak terdapat temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material. Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), konsep materialitas bersifat relevan untuk semua pemeriksaan. Sesuatu bersifat material jika pengetahuan mengenai hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna LHP. Materialitas ditentukan menggunakan pertimbangan profesional dan bergantung pada interpretasi pemeriksa terhadap kebutuhan pengguna LHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian kinerja dari kedua indikator yaitu kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material yang selama 5 (lima) tahun berturut-turut 100% atau sangat baik, hal ini dikarenakan tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pencapaian sasaran tersebut.

AKUNTABILITAS KINERJA

Tujuan 3

Mewujudkan Pemantauan dan Evaluasi yang obyektif terhadap perencanaan dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran.

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi.

Capaian kinerja pada sasaran 3 diukur melalui 2 (dua) indikator utama pada tahun 2019, yaitu:

- Indikator Utama 1 (Indikator 3.1. <Target 85%>) : Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- Indikator Utama 2 (Indikator 3.2. <Target 80%>) : Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan.

Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pengukuran capaian kedua indikator utama dimaksud diukur melalui survei. Survei untuk mengukur capaian kinerja unit-unit kerja di Kedeputian Bidang Administrasi dilaksanakan tanggal 13 Januari 2020 dengan memo pengantar nomor M.12/Adm-3/1/2020 kepada Pejabat/Pegawai di lingkungan Sekretariat kabinet. Survei dilaksanakan secara *online* dan *offline* serentak bagi 108 responden.

Adapun hasil capaian kinerja sasaran 3 sesuai penghitungan berdasarkan hasil survei dimaksud dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet	85%	80,30%	94,47%
2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80%	78,61%	98,26%

AKUNTABILITAS KINERJA

Apabila dirinci lebih lanjut, capaian atas sasaran 3 dimaksud merupakan capaian atas outcome dan output sebagai berikut:

Tabel 3.14
Capaian Output dan Outcome Sasaran 3 Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
<i>Output:</i>				
1. Laporan e-monev PP 39 Bappenas	Dok	1	1	100%
2. Laporan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kemenkeu (SMART)	Dok	1	1	100%
3. Laporan TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran)	Dok	1	1	100%
4. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Kabinet	Dok	2	2	100%
5. Laporan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019	Dok	0	1	n/a
<i>Outcome:</i>				
Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet	%	85	80,30%	94,47%
<i>Output:</i>				
Layanan Revisi DIPA dan POK DIPA	Layanan	1	1	100%
<i>Outcome:</i>				
Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	%	80	78,61%	98,26%

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.

Persentase Tingkat Pemanfaatan Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet

Indikator kinerja pertama dari sasaran 3 berupa “Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet” dengan target sebesar 85%. Adapun target, realisasi dan capaian sasaran ketiga indikator pertama (sasaran 3.1.) dapat dilihat pada gambar berikut.



Apabila dirinci capaian sasaran 3.1. berdasarkan hasil survei tanggal 13 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Tahun 2019

Pernyataan	Dokumen		Total Indeks (%)
	Dokumen Capaian Pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2019	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Kabinet	
Pemanfaatan Dokumen dalam Perbaikan Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran	81,02%	80,32%	80,67%
Pemanfaatan Dokumen dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran	80,79%	79,63%	80,21%
Pemanfaatan Dokumen untuk Menilai dan Memperbaiki Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Organisasi	80,32%	79,86%	80,09%

AKUNTABILITAS KINERJA

Pernyataan	Dokumen		Total Indeks (%)
	Dokumen Capaian Pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2019	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Kabinet	
Pemanfaatan Dokumen untuk Peningkatan Kinerja	79,86%	80,56%	80,21%
Rata-Rata			80,30%

Indikator kinerja terkait tingkat pemanfaatan dokumen hasil evaluasi sudah digunakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai indikator kinerja kegiatan sejak tahun 2009 s.d. 2019. Namun tentu disesuaikan dengan dinamika organisasi yang mengalami perubahan struktur, tata kerja serta sumber daya manusia. Berikut akan dijabarkan target dan capaian indikator kinerja sasaran 3.1 sesuai target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis (tahun 2015 s.d. 2019).

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Tahun 2015 s.d. 2019

Indikator Kinerja Sasaran 3.1.	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Target	85%	85%	85%	85%	85%
Realisasi	92,54%	73,98%	85,15%	80,75%	80,30%
Capaian	108,87%	87,03%	100,18%	95%	94,47%

Apabila dilihat tabel target dan capaian sasaran 3.1. tahun 2015 s.d. 2019 diatas, persentase capaian sasaran 3.1. mengalami tren penurunan sejak tahun 2018 s.d. tahun 2019. Pada tahun 2019 capaian kinerja sasaran 3.1. mengalami penurunan sebesar 0,40% jika dibandingkan persentase capaian tahun 2018.

Perlu analisis lebih lanjut terkait permasalahan yang menyebabkan tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet oleh unit kerja yang menurun. Namun demikian, berdasarkan jawaban responden atas kuesioner pada kolom saran pada survei 13 Januari 2020, diinventaris beberapa saran yang membangun dari unit kerja guna perbaikan kinerja sasaran 3.1., antara lain:

- a. Perlu adanya pemberitahuan terkait penyerapan anggaran secara periodik kepada unit kerja pelaksana kegiatan agar unit kerja dapat mengantisipasi kegiatan yang harus dilakukan.

AKUNTABILITAS KINERJA

- b. Perlunya pertemuan rutin, paling tidak 1 kali 1 bulan untuk evaluasi bersama sebagai antisipasi kendala atau masalah yg mungkin terjadi;
- c. Agar dibuat kamus definisi output serta cara menghitungnya, yang berkoordinasi dengan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, agar menjadi selaras.
- d. Agar laporan hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet dibuat dalam format infografis dengan tampilan yang lebih menarik dan dipublikasikan dalam website Sekretariat Kabinet, guna memudahkan pegawai dalam memperoleh informasi terkait dokumen tersebut.

Terkait saran tersebut, ditahun mendatang Biro Perencanaan dan Keuangan perlu melakukan beberapa hal antara lain:

- a. Menyusun laporan terkait penyerapan anggaran secara periodik dan mengirimkan laporan dimaksud kepada unit kerja pelaksana kegiatan agar unit kerja dapat mengantisipasi kegiatan yang harus dilakukan.
- b. Menyelenggarakan pertemuan rutin, untuk evaluasi bersama sebagai antisipasi kendala atau masalah yg mungkin terjadi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di Sekretariat Kabinet;
- c. Menyusun kamus definisi output serta cara menghitungnya, yang berkoordinasi dengan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- d. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam format infografis dengan tampilan yang lebih menarik dan mempublikasikan laporan dimaksud dalam *website* Sekretariat Kabinet, guna memudahkan pegawai dalam memperoleh informasi terkait dokumen tersebut.

AKUNTABILITAS KINERJA

3.2.

Persentase Kepuasan Unit Kerja Terhadap Pelayanan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan

Indikator kinerja kedua dari sasaran 3 yaitu “Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA” dengan target 80%. Adapun target, realisasi dan capaian sasaran ketiga indikator kedua (3.2.) dapat dilihat pada gambar berikut:



Apabila dirinci capaian sasaran 3.2. berdasarkan hasil survei tanggal 13 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Tahun 2019

No.	Pernyataan	Indeks Kepuasan (%)	
Ketanggapan dalam pelayanan (<i>responsiveness</i>)			
a.	Ketanggapan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	80,32%	79,40%
b.	Kecepatan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	79,40%	
c.	Kemudahan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	78,47%	
Keandalan dalam pelayanan (<i>reliability</i>)			
a.	Kemampuan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	79,40%	78,94%
b.	Ketepatan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	78,47%	
Kepastian dalam pelayanan (<i>assurance</i>)			
a.	Kepastian pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	78,94%	78,82%
b.	Keakuratan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	78,70%	
Sikap dalam pelayanan (<i>Emphaty</i>)			
a.	Keramahan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	80,09%	79,63%
			78,61%

AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Pernyataan	Indeks Kepuasan (%)	
b.	Kepedulian pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	79,17%	76,27%
Sarana dan Prasarana dalam pelayanan (<i>tangible</i>)			
a.	Ketersediaan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	76,62%	
b.	Kenyamanan dan kerapihan ruangan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	75,93%	

Selanjutnya, perbandingan target dan capaian kinerja sasaran 3.2 sesuai target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis (tahun 2015-2019) dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Tahun 2015 s.d. 2019

Indikator Kinerja Sasaran 3.2.	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Target	n/a	60%	80%	80%	80%
Realisasi	n/a	78,2%	84,6%	78,15%	78,61%
Capaian	n/a	130,3%	105,81%	97,69%	98,26%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan atas layanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA menurun di tahun 2018 dan kembali meningkat di tahun 2019, peningkatan sebesar 0,45% pada tahun 2019.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja kedua pada sasaran tiga pada tahun 2019 telah dilaksanakan 47 (empat puluh tujuh) kali revisi yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau 152 (seratus lima puluh dua) kali usulan revisi dari unit kerja yang diproses; 1 (Satu) kali revisi yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran; 4 (empat) kali revisi serta 2(dua) kali pemutakhiran data POK DIPA yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB).

Adapun hasil inventarisir saran berdasarkan hasil survei tanggal 13 Januari 2020 terkait permasalahan dalam pencapaian sasaran 3.2. adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dibangun sistem informasi yang terintegrasi antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi anggaran;
- b. Perlu ditunjuk satu orang penanggungjawab dari tiap unit kerja untuk menangani pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran sehingga menjadi satu jalur dan memudahkan untuk monitoring.

AKUNTABILITAS KINERJA

- c. Terkait poin b. perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran bagi penanggungjawab dari tiap unit kerja yang telah ditunjuk;
- d. Perlunya sosialisasi terkait kebijakan revisi anggaran kepada FO dan koordinator anggaran.

Terkait saran tersebut, ditahun mendatang Biro Perencanaan dan Keuangan perlu melakukan beberapa hal antara lain:

- a. Bekerjasama dengan unit Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk membangun sistem informasi yang terintegrasi antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi anggaran;
- b. Menunjuk penanggungjawab dari tiap unit kerja untuk menangani pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran sehingga menjadi satu jalur dan memudahkan untuk monitoring;
- c. Bekerjasama dengan unit kerja SDMOT untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran bagi penanggungjawab dari tiap unit kerja yang telah ditunjuk;
- d. Menyelenggarakan sosialisasi terkait kebijakan revisi anggaran kepada FO dan koordinator anggaran.

AKUNTABILITAS KINERJA

B. Analisis Penggunaan Sumber Daya

1. Realisasi Anggaran

Pagu yang diperjanjikan dalam PK Biro Perencanaan dan Keuangan pada periode tahun 2019 adalah sebesar Rp4.110.047.000,- Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran 1 sampai dengan 3 beserta realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2019

SASARAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	% REALISASI	%CAPAIAN KINERJA*
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran					
SASARAN 1	Rp1.882.177.000	Rp1.882.177.000	Rp1.550.288.647	82,36%	97,35%
Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan					
SASARAN 2	Rp853.400.000	Rp853.400.000	Rp842.423.500	98,71%	100%
Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi					
SASARAN 3	Rp1.374.470.000	Rp1.303.270.000	Rp1.065.994.427	81,79%	96,37%
TOTAL	Rp4.110.047.000	Rp4.038.847.000	Rp3.458.706.574	85,63%	98,02%

*rata-rata capaian indikator kinerja masing-masing sasaran

Pagu setelah revisi terakhir adalah Rp4.038.847.000,-, sampai dengan 31 Desember 2019 penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah Rp3.458.706.574,- atau **85,63%**.

Persentase capaian kinerja total adalah rata-rata capaian seluruh indikator kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu **98,02% (sangat baik)**. Realisasi anggaran sebesar 85,63% yang selaras dengan capaian kinerja sebesar 98,02% menunjukkan capaian penyerapan anggaran yang baik di tahun 2019.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan. Jumlah pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan di tahun 2019 (termasuk pegawai tidak tetap) adalah sebanyak 32 orang dengan rincian selama tahun 2017-2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20

Jumlah Sumber Daya Manusia Lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan

Jabatan	2017	2018	2019
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	1	1	1

Tabel 3.21

Jumlah Sumber Daya Manusia Lingkup Bagian Perencanaan

Jabatan	2017	2018	2019
Kepala Bagian Perencanaan	1	1	1
Kepala Subbagian Program dan Anggaran I	1	1	1
Kepala Subbagian Program dan Anggaran II	1	1	1
Analisis Perencanaan	3	3	3
Analisis Data dan Informasi	-	1	1
Analisis Keuangan	-	-	1
Pengolah Data	1	1	1
Pegawai Tidak Tetap	1	1	1
Jumlah	8	9	10

AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.22
Jumlah Sumber Daya Manusia Lingkup Bagian Keuangan

Jabatan	2017	2018	2019
Kepala Bagian Keuangan	1	1	1
Kepala Subbagian Verifikasi I	1	1	1
Kepala Subbagian Verifikasi II	1	1	1
Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1	1	1
Analisis Laporan	0	3	4
Penguji Data Keuangan	0	0	0
Pengolah Data	4	3	3
Bendahara Pengeluaran	1	1	1
Pegawai Tidak Tetap	1	1	1
Jumlah	10	12	13

Tabel 3.23
Jumlah Sumber Daya Manusia Lingkup Bagian Pemantauan dan Evaluasi

Jabatan	2017	2018	2019
Kepala Bagian PE	1	1	1
Kepala Subbagian PE I	1	1	1
Kepala Subbagian PE II	1	1	1
Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	4	4	2
Analisis Laporan Keuangan	-	-	1
Pegawai Tidak Tetap	1	1	1
Pegawai Tidak Tetap (Bertugas sebagai TU Biro Renkeu)	1	1	1
Jumlah	9	9	8

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Biro Perencanaan dan Keuangan selalu berusaha melaksanakan kinerja secara optimal dengan bantuan sumber daya manusia yang dimiliki. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan kepada Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2019, Biro Perencanaan dan Keuangan menghasilkan rata-rata capaian berdasarkan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yaitu sebesar **98,02%** dengan kategori **Sangat Baik**. Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran ini juga telah diimbangi dengan capaian penyerapan anggaran yang optimal dalam mendukung pencapaian kinerja. Untuk itu pada tahun mendatang Biro Perencanaan dan Keuangan diharapkan dapat terus menyusun perencanaan anggaran yang komprehensif melalui pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja sehingga dapat dihasilkan penyerapan anggaran yang optimal dan capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mendukung capaian kinerja Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet secara keseluruhan.

Langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan adalah:

1	Perlu dibangun Sistem Informasi di Sekretariat Kabinet yang terintegrasi terkait perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program, kegiatan, dan anggaran.
2	Berkoordinasi dengan baik secara internal di Biro Perencanaan dan Keuangan maupun secara eksternal dengan seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet agar seluruh tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar, termasuk perlunya ditunjuk satu orang penanggungjawab dari tiap unit kerja untuk menangani pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran sehingga menjadi satu jalur dan memudahkan untuk monitoring.
3	Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya di luar lingkungan Sekretariat Kabinet.

PENUTUP

4	Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan lebih intensif kepada koordinator/penanggung jawab/Fasilitasi Operasional anggaran dan pelaksana teknis unit kerja terkait pelaporan pelaksanaan anggaran dan kebijakan revisi anggaran.
5	Meningkatkan kapasitas/pengetahuan pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengikuti sosialisasi/bimtek terkait agar dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada unit kerja terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, sehingga dapat tepat sasaran dan bermanfaat oleh unit kerja.
6	Melakukan penyebarluasan informasi kepada unit kerja melalui Surat Edaran dan Memorandum.

Berbagai upaya perbaikan tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam membangun manajemen kinerja yang optimal di Biro Perencanaan dan Keuangan.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.

Jabatan : a.n. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.

Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi


Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
a.n. Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan


Farid Utomo, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 Persen
		Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material	0
3	Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran	85 persen
		Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Perencanaan dan Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet	
1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Rp.1.374.470.000,-
2. Penyusunan rencana kerja	Rp.1.882.177.000,-
3. Pengelolaan perbendaharaan	Rp.477.761.000,-
4. Penyusunan laporan keuangan	Rp.375.639.000,-
Total Anggaran	Rp.4.110.047.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi



Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
a.n. Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan



Farid Utomo, S.H., M.H.

Lampiran 2

MATRIKS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kategori Pencapaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80%	97,35%	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	Memuaskan
	Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material	0	100%	Memuaskan
Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85%	94,47%	Sangat Baik
	Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80%	98,26%	Sangat Baik

Lampiran 3

MATRIKS PENYERAPAN ANGGARAN

Deskripsi	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
Layanan Perencanaan	1.882.177.000	1.882.177.000	1.550.288.647	82,36%	331.888.353
Layanan Manajemen Keuangan	853.400.000	853.400.000	842.423.500	98,71%	11.156.500
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.374.470.000	1.303.270.000	1.065.994.427	81,79%	237.275.573
TOTAL	Rp4.110.047.000	Rp4.038.847.000	Rp3.458.706.574	85,63%	580.140.426

Lampiran 4

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI
LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

No.		Pernyataan	Checklist
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	√
		2 LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	√
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	√
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penangguna Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	√
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3 Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4 Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	√
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4 Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	√
		5 Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	√
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	√